



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 930/48 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI
WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2024

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 perlu ditetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 900/162/DK2OP-1/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, Hal : Daftar Usul Nama Pejabat yang Ditunjuk dan Diberi Wewenang sebagai Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Penetapan para Pejabat yang di Tunjuk dan di berikan Wewenang sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

126

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

126

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

126

19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 692);
20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 767) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 777);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Para Pejabat yang ditunjuk dan diberikan wewenang sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab para pejabat yang ditunjuk pada diktum KESATU agar berpedoman pada ketentuan Pasal 16, Pasal 138 dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penggantian pegawai karena mutasi dan karena sebab lain maka pejabat pengganti dapat diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Bupati Katingan untuk ditunjuk dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati Katingan;
- KELIMA : Spesimen Tanda Tangan, Paraf dan Cap Stempel Dinas/ Badan/Kantor/Instansi agar disampaikan kepada Bupati Katingan u.p. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 020/18 Tahun 2024 tentang Penetapan Para Pejabat yang ditunjuk dan diberikan Wewenang sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerima Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

12/12

- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing Tahun Anggaran 2024;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 20 April 2024



Tembusan :

- 1 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta :
u.p. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Inspektur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p. Kepala Bagian Hukum;
5. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Kasongan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 030/48 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI
WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/ PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	MINARTI YANTI Pengatur / II.c NIP. 19770520 201406 2 007	PENGADMINISTRASIAN UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN	-
2.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	YESMA FEBRIANI, S.E. Penata Muda / III.a NIP.19970209 202012 2 018	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	-
3.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	NONIATY Penata Muda / III.a NIP. 19791102 200701 2 011	FUNSDIONAL UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN	-
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	ITHAE SOESILAE, A. Md. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19770830 201001 2 002	VERIFIKATOR KEUANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN	-
5.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN	ARIF DWI YANTO, A.Md. Penata Muda / III.a NIP. 19831101 201001 1 009	PENALAAH DATA SUMBER DAYA ALAM	BENDAHARA PENERIMAAN	-
6.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	YUNIWON, A.Md. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19750615 201001 1 005	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	-

1	2	3	4	5	6
7.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	GREY, S.P. Penata / III.c NIP. 19860309 201101 1 001	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
8.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUPARNO Pengatur tingkat I (II/d) NIP. 197101192006041013	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
9.	DINAS KESEHATAN	MARTATI SIMBEL, S.E. Penata Muda Tingkat I/ III.b NIP. 19800321 201001 2 008	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN	-
		LIVIYANIE, A.Md.Kep. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP.19780612 200604 2 009	PERAWAT MAHIR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	RS PRATAMA TUMBANG SAMBA
		SITI JATARIAH, A.Md.Kep. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19780614 200604 2 021	PERAWAT MAHIR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC.KATINGAN KUALA PUSKESMAS PEGATAN I
		SEPTINA LIA SISKI, A.Md.Kep. Penata Muda / III.a NIP. 19940514 201903 2 025	BIDANG TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. KATINGAN KUALA PUSKESMAS PEGATAN II
		AMILIA MAULIDAH, A.Md.Farm. Pengatur / II.c NIP. 19800723 202203 2 021	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. MENDAWAI PUSKESMAS MENDAWAI
		RIA FATHUL SYABANA, S.ST. Penata Muda / III.a NIP. 19910216 201903 2 021	BIDAN MAHIR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. KAMPANG PUSKESMAS BAUN BANGO
		REYULITA HARIYANTI, A.Md.Kep. Penata Muda/ III.a NIP. 19850717 200904 2 001	PERAWAT MAHIR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. TASIK PAYAWAN PUSKESMAS PETAK BAHANDANG

6/9

1	2	3	4	5	6
		<p>KRISTIANA, A.Md.Kep. Pengatur / II.c NIP. 19790117 200604 2 014</p> <p>RUSEKA HAYATI UTAMI, AMG. Penata Muda / III.a NIP. 19900605 201402 2 004</p> <p>MELY, A.Md.Kep. Penata Muda / III.a NIP. 19821124 200604 2 014</p> <p>MASRINIE, A.Md.Kes. Penata Muda Tingkat I/ III.b NIP. 19800222 200604 2 018</p> <p>HOLY LORENTY S., A.Md.Kep. Pengatur Tingkat I/ II.d NIP. 19910331 201902 2 2014</p> <p>RENI JUSIA, A.Md.,AK. Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19921026 201402 2 001</p> <p>DAFID APRINANDO W., A.Md.,Kep. Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19930430 201503 1 003</p> <p>Apt. YENI YULANDA, S.Farm. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19920330 202203 2 008</p>	<p>PENGADMINISTRASIAN UMUM</p> <p>NUTRISIONIS MAHIR</p> <p>PERAWAT MAHIR</p> <p>PERAWAT GIGI MAHIR</p> <p>PERAWAT TERAMPIL</p> <p>PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL</p> <p>PERAWATAN TERAMPIL</p> <p>APOTEKER AHLI PERTAMA</p>	<p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p>	<p>UPTD KEC. KATINGAN HILIR PUSKESMAS KASONGAN I</p> <p>UPTD KEC. KATINGAN HILIR PUSKESMAS KASONGAN II</p> <p>UPTD KEC. KATINGAN HILIR PUSKESMAS KERENG PANGI</p> <p>UPTD KEC. TEWANG SANGGALANG GARING PUSKESMAS PENDAHARA</p> <p>UPTD KEC. PULAU MALAN PUSKESMAS BUNTUT BALI</p> <p>UPTD KEC. KATINGAN TENGAH PUSKESMAS TUMBANG SAMBA</p> <p>UPTD KEC. SANAMAN MANTIKEI PUSKESMAS TUMBANG KAMAN</p> <p>UPTD KEC. PETAK MALAI PUSKESMAS TUMBANG BARAOI</p> <p>HIRAN</p>

12h

1	2	3	4	5	6
		Apt. WAHYUNI ADITYA, S. Farm. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19961018 202203 2 007	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. MARIKIT PUSKESMAS TUMBANG
		MARTINA PUTRI, A.Md., Ak. Pengatur / II.c NIP. 19960327 202203 2 013	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. KATINGAN HULU PUSKESMAS TUMBANG SANAMANG
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANNA P. SARI, A.Md., Gz. Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19920615 201903 2 029	NUTRISIONIS TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. BUKIT RAYA PUSKESMAS TUMBANG KAJEMEI
		EDUARD PANJUNG Pengatur / II.c NIP. 19710117 201406 1 001	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
11.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	FEBRI Pengatur (II/c) NIP. 19810717 201406 1 005	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
12.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	KAMLIN Penata Muda / III.a NIP. 19830711 201406 1 003	ANALIS PERDAGANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN	-
13.	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	TABING GEOVANI, S.Par. Penata Muda / III.a NIP. 19911109 202012 1 010	ANALIS PARIWISATA	BENDAHARA PENERIMAAN	-

126

1	2	3	4	5	6
14.	DINAS PENDIDIKAN	RAHMAWATY, S.Sos. Penata / III.c NIP. 19800413 200701 2 008	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
15.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERIKINAN	AFRIA WANTIRIA, S.Sos. Penata Muda / III.a NIP. 19800416 200701 2 014	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
16.	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	VIVIEN PARAMITHA, A.Md. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19880424 201101 2 006	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT INDUSTRI ROTAN HAMPANGEN	BENDAHARA PENERIMAAN	-
17.	KECAMATAN KATINGAN KUALA	NATALIA LUSIANA, S.Sos. Penata / III.c NIP. 19711215 199303 2 008	KASI PEMBANGUNAN	BENDAHARA PENERIMAAN	-
18.	KECAMATAN MENDAWAI	RAHMAD HIDAYAT Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19791224 200701 1 015	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
19.	KECAMATAN KAMIPANG	MAHMUD HADRIANSYAH Pengatur Muda / II.a NIP. 19800613 201212 1 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
20.	KECAMATAN TASIK PAYAWAN	MOHENDRA BOBY Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19780219 200701 1 013	TENAGA ADMINISTRASI	BENDAHARA PENERIMAAN	-
21.	KECAMATAN KATINGAN HILIR	LINDA, S.E. Penata Muda / III.a NIP. 19740217 201406 2 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
22.	KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING	ENDAH SUKARSIH, S.E. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19771110 201001 2 005	KEPALA SEKSI TETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN	-

126

1	2	3	4	5	6
23.	KECAMATAN PULAU MALAN	FERDINAND Pengatur / II.c NIP. 19690807 201212 1 001	PELAKSANA	BENDAHARA PENEKIMAAN	-
24.	KECAMATAN KATINGAN TENGAH	ATO Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19671210 200906 1 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
25.	KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI	NEMIA TIE Pengatur / II.c NIP. 19711203 201001 2 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
26.	KECAMATAN KATINGAN HULU	RAHMAD HIDAYAT Pengatur / II.c NIP. 19800810 200701 1 013	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
27.	KECAMATAN MARIKIT	PANDANG NIP. 19680624 200701 1 022	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
28.	KECAMATAN PETAK MALAI	PRANTIO, A.Md. Penata Muda (III/a) NIP. 19770112 201001 1 006	PENGADMINISTRASI UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN	-
29.	KECAMATAN BUKIT RAYA	HENDRO SENAS, S.Sos. Penata Muda / III.a NIP. 19780507 200604 1 006	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BENDAHARA PENERIMAAN	-

Pj. BUPATI KATINGAN,

